



Judul : Kedaulatan rakyat masih sebatas mencoblos
Tanggal : Kamis, 02 Nopember 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Kedaulatan Rakyat masih Sebatas Mencoblos

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) menyoroti kondisi toleransi di Indonesia yang penerapannya belum maksimal.

THEOFILUS IFAN SUCIPTO
redaksi@mediaindonesia.com

CINDEKIAWAN muslim Komaruddin Hidayat mengkritik kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Partisipasi masyarakat dinilai masih dipandang sebelah mata oleh elite politik.

"Kedaulatan rakyat terjadi ketika mencoblos saja di kotak suara. Tapi setelah itu lepas lagi," kata Komaruddin dalam Forum Diskusi Denpasar 12 secara virtual, kemarin.

Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia itu juga sangsi saat ini pemerintah dan partai politik (parpol) masih mendengar aspirasi masyarakat. Dia membandingkan peran parpol yang dulu masih memperhatikan suara publik.

"Mereka (masyarakat) disuguhi tindakan-tindakan di luar nalar sehat, *common sense*, dan ketidakadilan. Kalau hegini, perlu perbaikan," papar dia.

Menurut Komaruddin, faktor lainnya ialah korupsi yang masih marak terjadi. Hal itu dibarengi dengan penegakan hukum yang dinilai belum maksimal. "Sehingga persepsi masyarakat pada institusi negara melemah," jelas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) menyoroti kondisi soal toleransi di Indonesia. Penerapan itu dinilai belum maksimal dan membutuhkan kerja sama seluruh pihak.

Rerie—sapaan akrab Lestari—mengatakan Indonesia memiliki konsensus kebangsaan sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat. Indonesia juga telah memiliki acuan seperti

Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, hingga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Ini menjadi pusat refleksi dan nilai untuk sama-sama membangun rasa kebangsaan dan mewujudkan cita-cita kehangsaan seperti yang diinginkan *founding fathers*," papar politikus Partai NasDem itu dalam forum yang sama.

Rerie mengutip data Setara Institute soal rata-rata indeks kota toleran (IKT) nasional pada 2022 yang turun menjadi 5,03. Sementara itu, rata-rata IKT nasional pada 2021 mencapai 5,24.

Kelola perbedaan

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menekankan pentingnya menjaga keutuhan di tengah masyarakat. Hal itu krusial agar Indonesia tidak terpecah di tengah banyak perbedaan.

"Ketika perbedaan ini kita tidak kelola dengan baik dan hima dengan baik, maka perbedaan itu memiliki potensi menjadikan sebuah perpecahan dan peluang terjadinya gesekan sosial," katanya.

Ahmad mengatakan masyarakat Indonesia memiliki banyak perbedaan. Mulai perbedaan suku, agama, golongan, hingga pilihan dalam rangka menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ahmad menyebut perbedaan itu membuat Indonesia kaya akan budaya hingga tradisi. Namun, di sisi lain, perbedaan tersebut bisa dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Negara kita rentan bila keutuhan bangsa ini gampang terpecah belah dan bila bangsa ini gampang diadu domba," ujar dia. (P 2)